

**IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ANAK
DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Ananditya Damayanti

NPP. 29.0766

*Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : ananditya.damayanti@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the high number of children who should receive education but do not receive education and the community's unpreparedness in the success of the compulsory education program in Purworejo Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the Child Friendly District program in Purworejo Regency, Central Java Province along with the inhibiting factors. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach with the perspective of policy implementation theory according to Edwards III. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation studies. In collecting qualitative data, the authors conducted in-depth interviews with 8 informants. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are the lack of socialization carried out by the Government, the highest level of KLA program organizers does not give appreciation for the achievements of the program achievements obtained by the Regency/City. **Conclusion:** The implementation of the Child Friendly District program in improving the quality of children's education in Purworejo Regency, Central Java Province in general has not been going well due to the lack of socialization carried out, programs that have not been fully understood by each agency, and the uneven procurement of facilities and infrastructure that support primary learning. There are several obstacles including the lack of communication between stakeholders caused by the busyness of each SKPD, the limited budget funds used in implementing the Child Friendly District program in the education sector.

Keywords: Pogram Implementation, Child Friendly District, Education Rights

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya angka anak yang seharusnya memperoleh pendidikan tetapi tidak memperoleh pendidikan dan kurang siapnya masyarakat dalam mensukseskan program wajib belajar di Kabupaten Purworejo. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah beserta dengan faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi kebijakan menurut Edwards III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan, tingkatan tertinggi penyelenggara program KLA tidak memberikan apresiasi atas prestasi pencapaian program yang diperoleh Kabupaten/Kota. **Kesimpulan:** Implementasi program Kabupaten Layak Anak dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah secara umum belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan, program yang belum sepenuhnya dipahami oleh setiap instansi, serta belum meratanya pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran utama. Terdapat beberapa hambatan meliputi kurangnya komunikasi antar stakeholder yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing SKPD, terbatasnya anggaran dana yang digunakan dalam melaksanakan program Kabupaten Layak Anak pada bidang pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Kabupaten Layak Anak, Hak Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset dan investasi masa depan dari sebuah bangsa. Seorang anak yang menjadi generasi penerus bangsa dan negara, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut membangun negara dan bangsa Indonesia. Semakin baik karakter anak masa kini, maka semakin baik pula kehidupan masyarakat masa depan. Sebaliknya, jika seorang anak memiliki kepribadian yang buruk, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Sehingga setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menjamin pemenuhan hak anak, maka akan mewujudkan kondisi anak yang siap memelihara, mempertahankan, mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial, serta menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Maka pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) hasil sidang Majelis Umum PBB.

Sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak maka Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bersama sektor pemerintahan terkait mengembangkan Program Kabupaten/Kota Layak Anak atau disingkat KLA. Kabupaten atau Kota Layak Anak

dikembangkan pertama kali pada tahun 2006 dan diujicobakan pada tahun 2014. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan Kabupaten/Kota Layak Anak dibagi dalam empat kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak yang bertujuan mengembangkan komitmen pemerintah Kabupaten Purworejo dalam upaya melindungi, memfasilitasi tumbuh dan kembang anak secara optimal baik fisik, mental maupun sosial sebagai generasi penerus bangsa yang berkahlak mulia, sehat dan cerdas.

Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak terdapat 5 klaster hak anak yang harus dipenuhi diantaranya klaster hak sipil dan kebebasan, klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster hak pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster hak perlindungan khusus. Namun, dalam penelitian ini hanya fokus pada pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting khususnya dalam menciptakan generasi di masa depan. Pencapaian pendidikan dalam satu generasi memiliki efek positif pada pencapaian pendidikan generasi berikutnya.

Meski telah diakui sebagai Kabupaten Layak Anak dengan peraturan yang mengatur penegakan hak-hak anak, namun pemerintah Purworejo belum puas. Masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di kabupaten Purworejo terkait pemenuhan hak anak khususnya dalam pemenuhan hak Pendidikan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 di SD/Sederajat ada penurunan dari 243.716 anak menjadi 237.410 anak. Namun, yang menarik di SMA yaitu dari 169.798 anak di tahun 2018 meningkat menjadi 175.509 anak pada tahun 2019. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih banyak anak yang seharusnya memperoleh pendidikan tetapi tidak memperoleh pendidikan. Padahal pada kebijakan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Purworejo telah menerapkan menuju Wajib Belajar 12 Tahun. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo penyebab putus sekolah antara lain karena masalah ekonomi, lingkungan dan merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK). Dengan demikian, perlu dianalisa sejauh mana keberhasilan program Kabupaten Layak Anak yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Purworejo khususnya dalam bidang Pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk

mengambil judul “Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purworejo ini. Cukup banyak anak di Kabupaten Purworejo yang tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai sebab, salah satunya adalah faktor ekonomi. Mereka lebih memilih untuk mencari penghasilan karena terbatasnya kemampuan finansial keluarga. Hal ini sejalan dengan data BPS Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebanyak 230.466 orang yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar atau Tidak Pernah mengenyam Pendidikan memilih untuk bekerja (Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan). Padahal seharusnya anak mendapatkan hak mereka dalam mengenyam Pendidikan. Selain itu masih terdapat pola pikir masyarakat yang belum berkembang dan mereka lebih mementingkan nafkah daripada menyekolahkan anak. Hal ini menunjukkan kurang siapnya masyarakat dalam mensukseskan program wajib belajar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Reni Bandari Abdi berjudul Implementasi Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan (Reni Bandari, 2014) menemukan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak masih kurang. Selain itu masih kurangnya sosialisasi tentang program KLA yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian (Gerry Katon, 2017) menemukan bahwa masih minimnya kerjasama antar stakeholder sehingga mengakitbatkan pelaksanaan Kebijakan KLA yang dilakukan secara umum dan bidang pelayanan Kesehatan ramah anak masih kurang. Penelitian (Tegar, 2019) menemukan bahwa Pemerintah belum memaksimalkan pemenuhan hak-hak sipil, salah satunya karena kurangnya penguatan forum anak, dan penyediaan informasi yang memadai serta penerbitan akta kelahiran yang terhenti sehingga tujuan awal dari kebijakan Kabupaten Layak Anak pada pemenuhan Hak Sipil belum tercapai sepenuhnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni program Kabupaten Layak Anak yang berfokus pada pemenuhan hak pendidikan anak, teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Edwards III yang juga berbeda dengan teori yang digunakan oleh Reni, Gerry dan Tegar.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah beserta dengan faktor penghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan hubungannya dengan fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan pada Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan teori Miles dan Huberman yang dilakukan dengan menganalisis masing-masing pertanyaan penelitian satu persatu sehingga dalam teknik analisis data bersifat kualitatif, pengolahan datanya dideskripsikan dalam suatu penjelasan yang berbentuk kalimat-kalimat yang pada akhirnya diharapkan dapat mengemukakan gambaran jelas tentang faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purworejo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan anak berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang terdiri dari empat faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program tersebut.

3.1 Implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

3.1.1 Komunikasi

Kegiatan penyampaian informasi program itu dilakukan dalam bentuk pemberian materi atau pengetahuan mengenai program yang akan dilakukan oleh pihak stakeholder, melaksanakan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak, mengkomunikasikan informasi-informasi melalui rapat koordinasi, melalui sosialisasi terkait pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Purworejo, melalui P2 (Pelopor dan Pelapor) oleh forum anak, serta melalui media pers. Namun, saat penelitian ditemukan fakta bahwa informasi tentang program Kabupaten Layak Anak di bidang pendidikan belum sepenuhnya terinformasikan kepada anak-anak. Dalam keberlanjutannya, diadakan rapat evaluasi yang diadakan setiap satu tahun sekali bersama tim Gugus Tugas Layak Anak.

3.1.2 Sumber Daya

Hal yang ditemukan di lapangan oleh peneliti adalah, beberapa informan menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka mengalami kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Ditandai dengan kualitas yang belum merata pada unsur-unsur implementor yang belum seluruhnya mempunyai sertifikat sosialisasi Konvensi Hak Anak, sehingga belum maksimal dalam mendorong program Kabupaten Layak Anak pada bidang Pendidikan untuk mencapai keberhasilan.

Berkaitan dengan fasilitas, berdasarkan data sekunder masih terdapat sekolah yang belum menyediakan fasilitas utama belajar, yaitu perpustakaan.

3.1.3 Disposisi

Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan bukan saja mengetahui tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Sikap para pelaksana secara keseluruhan mendukung adanya program Kabupaten Layak Anak khususnya di bidang Pendidikan, berdasarkan data sekunder dapat dilihat dari adanya upaya dengan Peraturan Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak, adanya partisipasi anak yang dilibatkan melalui Forum Anak. Hal tersebut diperkuat dengan data sekunder yang menyatakan bahwa pemenuhan terhadap hak anak sudah mencapai 85%.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Model implementasi program Kabupaten Layak Anak ini menggunakan pendekatan Top-Down, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo yang menjadi pihak dalam melakukan pemenuhan hak anak di lingkungan Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo berkedudukan sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang bertugas mengamanatkan tugas pokok dan fungsi kepada setiap instansi yang bertanggung jawab setiap klaster.

Berkaitan dengan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai, dapat dilihat dalam implementasinya untuk pembuatan peraturan tentang Kabupaten Layak Anak yang membuat adalah bagian Hukum Setdakab Purworejo selanjutnya untuk pengesahannya melibatkan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, selanjutnya untuk tugas sosialisasi di beri kewenangan DPPAPMD serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyebarkan informasi tentang Kabupaten Layak Anak di bidang Pendidikan.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Kabupaten Layak Anak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Komunikasi

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa komunikasi yang terjalin antar para stakeholder belum terlaksana secara rutin berkelanjutan disebabkan oleh kesibukan masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaan implementasi terhambat dan tidak berjalan lancar.

3.2.2 Sumber Daya

Berkaitan dengan anggaran, anggaran yang digunakan dalam program Kabupaten Layak Anak ini tidaklah sedikit, sedangkan APBD dan APBN tidak cukup untuk memenuhi fasilitas yang menunjang bidang pendidikan dan melakukan sosialisasi maka kebijakan ini masih belum berjalan optimal karena terkendala biaya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program Kabupaten Layak Anak merupakan program yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan dengan cara lintas sektor dan pemangku kepentingan melalui pemenuhan 5 klaster hak anak. Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan yaitu belum dilaksanakannya sosialisasi serta belum meratanya pembangunan fasilitas atau sumber belajar untuk sekolah karena terhambat dengan anggaran. Sama halnya dengan temuan Reni Bandari Abdi (2014) bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan.

Selain itu ditemukan fakta bahwa tingkatan tertinggi penyelenggara program KLA tidak memberikan apresiasi atas prestasi pencapaian program yang diperoleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya pemberian apresiasi dapat menjadi motivasi kepada Kabupaten/Kota agar dapat mensukseskan program Kabupaten Layak Anak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi program Kabupaten Layak Anak dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah secara umum belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan, program yang belum sepenuhnya dipahami oleh setiap instansi, serta belum meratanya pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran utama. Terdapat beberapa hambatan meliputi kurangnya komunikasi antar stakeholder yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing SKPD, terbatasnya anggaran dana yang digunakan dalam melaksanakan program Kabupaten Layak Anak pada bidang pendidikan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait waktu dan lingkup permasalahan penelitian. Waktu yang cukup singkat membuat hasil penelitian yang diperoleh mungkin kurang memuaskan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purworejo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purworejo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo
- Creswell, J., & Poth, C. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Studi Kasus*. Jakarta: CAPS

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, (2011).

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak, (2014).

Abdi, R. B. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)*. [http://repository.fisip-untirta.ac.id/636/1/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_KABUPATENKOTA_LAYAK_ANAK_%28KLA%29_DI_KOTA_TANGERANG_SELATAN - Copy.Pdf](http://repository.fisip-untirta.ac.id/636/1/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_KABUPATENKOTA_LAYAK_ANAK_%28KLA%29_DI_KOTA_TANGERANG_SELATAN_-_Copy.Pdf)

Liwananda, M. T. T. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761>

Mahendra, G. K. (2017). *Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak*. 1(2), 95–104.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>. Data Kasus

Pengaduan Anak 2016-2020. Sabtu, 18 September 2021

